



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2019 – 2020.
Masa Persidangan ke-	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Secara Virtual
Dengan	: Perpustakaan Nasional RI
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 April 2020.
Pukul	: 10.00 – Selesai
Media yang Digunakan	: Zoom
Pimpinan Rapat	: Dr.H.Abdul Fikri Faqih,MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SH. MH/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Kebijakan Perpustnas RI terkait Dampak Pandemi Covid-19</b> <b>2. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2019</b> <b>3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019</b> <b>4. Perkembangan Perpustakaan Digital dan Pemanfaatan Perpustakaan online untuk edukasi Covid-19</b> <b>5. Perkembangan Pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2020</b>
Hadir Komisi X DPR RI	: 37 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: M. Syarif Bando/Kepala Perpustakaan Nasional beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI secara virtual dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh **Syaiful Huda**/Ketua Komisi X DPR RI, dilanjutkan oleh **Dr.H.Abdul Fikri Faqih,MM**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustnas RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi Perpustakaan RI yang telah menyusun kebijakan dan melakukan langkah-langkah strategis bidang Perpustakaan termasuk kebijakan Perpustakaan tentang perpustakaan digital dan layanan online terkait pandemi Covid-19.
2. Mengenai kebijakan-kebijakan bidang Perpustakaan terkait pandemi Covid-19, dan realokasi anggaran Perpustakaan RI pada APBN TA 2020, Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI;
  - a. Memaksimalkan perpustakaan digital dan/atau perpustakaan *online*, serta perpustakaan keliling dalam upaya penguatan literasi masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19.
  - b. Melakukan kerjasama dengan K/L lain, provider Informasi dan Teknologi (IT), dan media untuk melakukan sosialisasi mengenai perlunya membaca melalui perpustakaan *online* (i-Pusnas, Indonesia *One Search*, Khastara).
  - c. Materi buku dan bahan pustaka dalam bentuk perpustakaan *online* dan/atau perpustakaan digital agar disesuaikan kebutuhan bahan bacaan untuk masyarakat umum, pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
  - d. Agar Perpustakaan RI sementara ini menggantikan fasilitas pemakaian auditorium dan ruang kerja bersama (*co working space*) menjadi fasilitas penggunaan panggilan konferensi (*conference call*) berbayar yang bisa melibatkan partisipan yang banyak dalam waktu yang lama untuk dimanfaatkan berbagai komunitas literasi.
  - e. Memperkuat Gerakan Literasi dengan memperbanyak judul bahan pustaka dan salinannya yang kontennya memiliki lima fungsi, yaitu (i) pendidikan; (ii) keterampilan, (iii) hiburan, (iv) budaya, dan (v) penyimpanan karya sesuai dengan UU No 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dan UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
  - f. Memberikan layanan pengunduhan gratis buku-buku, khususnya untuk kepentingan akademik dan penelitian di Perguruan Tinggi.
  - g. Melibatkan Komunitas Literasi untuk menggerakkan kembali minat masyarakat terhadap bahan pustaka berbasis budaya/legenda Indonesia melalui gerakan mendongeng, diskusi, dan lain-lain.
  - h. Di masa Pandemi Covid-19, agar Perpustakaan RI memperhatikan nasib Pustakawan terutama yang bukan PNS, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta untuk menjadi penerima manfaat jaring pengaman sosial.
  - i. Tetap memperhatikan dan mengembangkan strategi inklusi sosial untuk melayani kebutuhan literasi masyarakat marginal yang paling terdampak Covid-19.

3. Komisi X DPR RI mengapresiasi daya serap APBN TA 2019 yang mencapai sebesar 94,95% dengan nilai kinerja sebesar 94,37 dan selanjutnya mendorong Perpusnas RI untuk mempertahankan penilaian BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun Anggaran 2019 dan tahun-tahun selanjutnya.
4. Terhadap alokasi anggaran DAK Fisik Reguler Perpusnas RI Tahun 2020 yang dilakukan pemotongan sebesar kurang lebih Rp375.853.240.637,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

No	Uraian	Anggaran
1	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020	450.000.000.000
2	Alokasi DAK Fisik Reguler Tahun 2020 yang telah kontrak	74.141.759.363 -
	<b>Total</b>	<b>375.853.240.637</b>

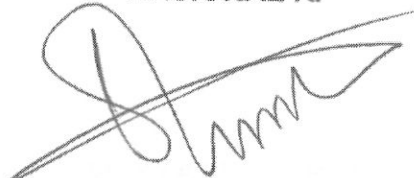
Komisi X DPR RI mendorong, agar pemotongan anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 dan program-program perpustakaan atau penguatan literasi.

5. Komisi X DPR RI dan Perpusnas RI sepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat yang secara khusus membahas perubahan anggaran APBN TA 2020 akibat kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### III. PENUTUP

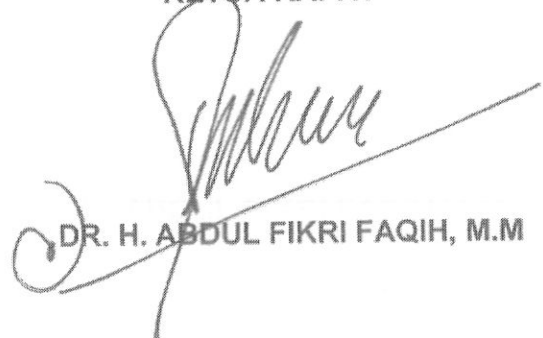
Rapat ditutup pada pukul 13.45 WIB

**KEPALA PERPUSTAKAAN  
NASIONAL RI**



**MUHAMMAD SYARIF BANDO**

**KETUA RAPAT**



**DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M**